



Targetkan Kurangi RTLH Jadi 1.500 Unit

KOTA, *Joglo Jogja* – Pada awal 2022, jumlah rumah tidak layak huni (RTLH) di Kota Yogyakarta tercatat 2.187 unit. Dengan sebaran paling banyak di Kecamatan Tegalrejo. Oleh karenanya, Pemkot menargetkan mengurangi jumlah RTLH di wilayahnya menjadi sekitar 1.500 unit pada akhir 2022. Kepala Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta, Agus Tri Haryono mengatakan, bahwa pihaknya akan melakukan upaya pengurangan jumlah RTLH. Antara lain dengan melakukan perbaikan rumah menggunakan pendanaan dari program tanggung jawab sosial perusahaan (Corporate Social Responsibility/CSR).



“Penggunaan pendanaan dari CSR untuk perbaikan rumah tidak layak huni lebih fleksibel, bisa mencakup rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat mendapat bantuan dari pemerintah daerah,” ungkapnya.

Agus Tri Haryono
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Yogyakarta

“Penggunaan pendanaan dari CSR untuk perbaikan rumah tidak layak huni lebih fleksibel, bisa mencakup rumah tidak layak huni yang tidak memenuhi syarat mendapat bantuan dari pemerintah daerah,” ungkapnya. Menurutnya, beberapa RTLH tidak memenuhi syarat mendapat bantuan dari pemerintah daerah. **Baca TARGETKAN... Hal II**

Targetkan Kurangi RTLH Jadi 1.500 Unit

sambungan dari hal *Joglo Jogja*

Yakni antara lain RTLH yang tidak memiliki syarat formal berupa alas hak yang jelas.

“Apabila membutuhkan bantuan untuk perbaikan rumah, maka bisa diintervensi melalui CSR. Salah satunya adalah dari BAZNAS Kota Yogyakarta,” terangnya.

Selain melakukan perbaikan rumah tidak layak huni, Pemkot Yogyakarta berupaya meningkatkan kualitas permukiman. Yaitu melalui penataan wilayah serta menyediakan

rumah susun.

Penataan wilayah permukiman di kawasan kumuh yang berada di bantaran sungai dilaksanakan dengan konsep M3K atau mundur, munggah, dan madep kali. Yakni dengan memundurkan bangunan, menaikkan bangunan, dan menghadapkan bangunan ke arah sungai.

“Penataan M3K di bantaran sungai terkesan dilakukan spot demi spot. Karena memang rumah warga di tepi sungai

memiliki luasan kecil, sehingga jika harus dipangkas dan dinaikkan tentu luasanya semakin kecil. Jadi diprioritaskan yang lebih memungkinkan untuk dimundurkan,” jelasnya.

Ia menambahkan, penataan permukiman di daerah bantaran sungai dilakukan berkoordinasi dengan Balai Besar Wilayah Sungai. Serayu-Opak. Tahun ini penataan permukiman di bantaran sungai dilakukan di Kelurahan Prenggan menggunakan dana

Rp1,8 miliar dari APBD Kota Yogyakarta.

Luas kawasan permukiman kumuh di Kota Yogyakarta yang pada awal 2021 tersisa 114 hektare sudah bisa dikurangi sekitar 20 hektare. Hal ini melalui program-program yang dijalankan oleh pemerintah. Pemerintah Kota Yogyakarta menargetkan pada akhir 2022 luas kawasan permukiman kumuh berkurang menjadi di bawah 90 hektare. (ara/bid)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Badan Perencanaan Pembangunan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 21 Juni 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005